

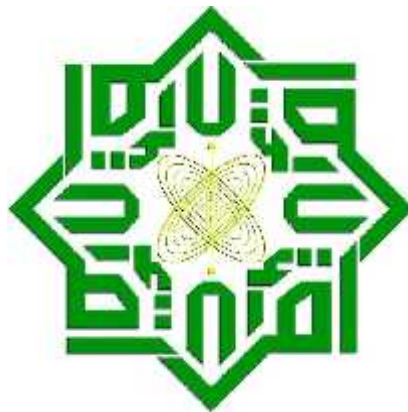
**PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA PT
. QUART TRUST PEKANBARU**

SKRIPSI

OLEH :

RICKY KURNIAWAN

NIM : 10973005804



PROGRAM S.1

JURUSAN AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

ABSTRAK

PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA PT. QUART TRUST PEKANBARU

OLEH :

RICKY KURNIAWAN

10973005804

PT. Quart Trust adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang konsultan konstruksi dan non-konstruksi. PT. Quart Trust didirikan tahun 2006. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan telah menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pada PT. Quart trust Pekanbaru.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk jadi seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) serta struktur organisani. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil dari penelitian penulis dapatkan dari PT. Quart Trust membebaskan biaya-biaya yang tidak diperkenankan dalam undang-undang perpajakan sebagai pengurang penghasilan perusahaan seperti : Biaya Entertainment yang tidak membuat daftar nominatif, Biaya sumbangan, Biaya telepon seluler untuk kepentingan pribadi, sebagai pengurang penghasilan

Untuk itu penulis menyarankan perusahaan mengetahui tentang peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 36 tahun 2008

Kata kunci : pajak penghasilan, Biaya Entertainment, Biaya Sumbangan, Biaya Telepon Seluler

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr. wb.

Alhamdulillah *rabbi* *lamin*. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, karunia, serta kasih sayang-Nya kepada penulis. *Shalawat* beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 PADA PT. QUART TRUST PEKANBARU” guna memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian comprehensive untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini ananda persembahkan khusus kepada ayahanda **IRWADI** dan ibunda tercinta **MANISTA**. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a, dan inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada ananda. Terima kasih buat adik-adikku **Andhi Setiawan, Taufik Hermawan, Adelia Septianingsih** atas dukungan dan do’a nya serta bantuan moril dan materil untuk keberhasilan penulis. Serta keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang selama ini.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Nazir selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf.
2. Bapak DR. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Pudek I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dony Martias, SE, MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Elisanovi SE, MM, Ak sebagai penasehat akademis saya.
6. Bapak Alcuhdri selaku dosen konsultasi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri SUSKA Riau
10. Bapak pimpinan PT. Quart Trust Pekanbaru.

11. Buat orang yang paling berharga dan Spesial dalam hidupku yang Terkasih Shinta Puspita Sari yang selalu ada disaat sedih dan senang memberikan perhatian, dukungan dan semangat dan begitu banyak kenangan yang tak kan terlupakan.

12. Buat teman-teman seperjuangan dari angkatan 2009 di jurusan akuntansi khususnya lokal B dan lokal A,C,D,E dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Amin yaa Rabbal 'Alamiin..*

Pekanbaru, Mei 2013

Penulis

Ricky Kurniawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
 BAB II TELAAH PUSTAKA	 7
2.1 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan	7
2.2 Pengertian Pajak	7
2.3 Pajak Penghasilan.....	9
2.4 Subjek Pajak Penghasilan.....	11
2.5 Objek Pajak Penghasilan	16
2.6 Tarif Pajak	24
2.7 Wajib Pajak Badan	26
2.7.1 Pengertian Badan dan Wajib Pajak Badan	26
2.7.2 Pajak Penghasilan Badan.....	27
2.7.3 Kewajiban Wajib Pajak Badan Dalam Perpajakan	28
2.7.4 Pembukuan	29
2.7.5 Kewajiban Melakukan Pemotongan dan Pungutan	30
2.7.6 Hak Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan	35
2.7.7 Saat Terutang Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan	35

2.8 Perhitungan Laba Menurut Undang-Undang Perpajakan	37
2.8.1 Biaya-Biaya yang Diperkenankan Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto	38
2.8.2 Pengeluaran-Pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan Sebagai Biaya	41
2.9 Teori Nominatif.....	43
2.10 Pajak Dalam Islam	44
 BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	47
3.1 Sejarah Singkat Perusahaan	47
3.2 Struktur Organisasi.....	47
3.3 Aktifitas Perusahaan.....	51
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Perhitungan Laba Menurut Undang-Undang Perpajakan	52
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam Pembangunan Nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat.

Untuk mengetahui besarnya pajak yang dibayar oleh perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha, pemerintah perlu menetapkan Undang-undang yang mengatur bidang perpajakan. Undang-undang perpajakan inilah yang nantinya menjadi pedoman bagi perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha dalam menentukan besarnya pajak yang menjadi kewajiban mereka kepada Negara.

Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu unsur penting dalam operasional perusahaan. Terlebih lagi perusahaan yang berskala nasional ataupun internasional, hampir semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana

wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan badan.

Pihak fiskus tidak selalu menerima perhitungan laba rugi menurut perusahaan. Hal ini terjadi karena fiskus menghitung laba rugi perusahaan dengan berpedoman kepada Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akibatnya terjadi perbedaan pengakuan penghasilan dan beban.

Penulis menjumpai adanya beberapa kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada PT.QUART TRUST PEKANBARU yaitu pada saat melakukan pengamatan, penulis mendapatkan informasi bahwa di dalam laporan Laba Rugi adanya Biaya Entertainment sebesar Rp. 10.000.000,- sedangkan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 UU PPh bahwa Biaya Entertainment dapat dimasukkan sebagai pengurang biaya, akan tetapi wajib pajak harus membuat daftar nominatif dalam SPT tahunan. Dalam biaya entertainment komponen-komponen yang dimasukan yaitu: representasi, jamuan dan sejenisnya yang dapat dikurangkan dari penghasilan.

Pembebanan biaya-biaya tersebut sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 27 Tahun 1986 dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan

(formal) dan benar-benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materil).

Selanjutnya di dalam Laporan Laba/Rugi juga terdapat Biaya Sumbangan sebesar Rp. 5.000.000,- yang seharusnya tidak boleh dibebankan sebagai pengurangan biaya, hal ini dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa biaya sumbangan selain dari biaya memperoleh, menagih, dan memelihara Pajak Penghasilan.

Biaya sumbangan seharusnya dalam laporan Laba/Rugi dimasukkan kedalam biaya lain-lain dikarenakan sumbangan merupakan bukan biaya pengurang bruto kecuali sumbangan yang sudah ditetapkan perusahaan (donator tetap) dan pada SPT tahunan PPh WP badan biaya sumbangan dimasukkan dalam biaya lainnya

Cara pelaporannya dimasukkan dalam laporan Laba/Rugi dibiaya lainnya, kalau sumbangan diluar sebagai donator tidak dipotong persen pengeluaran sumbangan jika pihak perusahaan ada sebagai donator maka pengeluaran atau persen sumbangan tergantung kebijakan perusahaan

Dari hasil wawancara penulis menemukan adanya kesalahan pencatatan dalam Laporan Laba/Rugi dimana dengan Biaya Telepon terdapat Biaya Telepon Seluler Direktur sebesar Rp.5.000.000,- yang seharusnya tidak boleh dibebankan sebagai pengurangan biaya, hal ini dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Dari Permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. QUARTS TRUST PEKANBARU dengan judul :**“Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada PT. Quart Trust Pekanbaru.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat penulis kemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

“Apakah PT. QUART TRUST PEKANBARU telah melakukan pencatatan yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku?”

C. Tujuan Penelitian.

“Untuk mengetahui apakah PT. QUART TRUST PEKANBARU telah melakukan pencatatan yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku”

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam mengoreksi dan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25 serta perhitungan Pajak yang terhutang pada akhir tahun.
- b. Untuk menambah wawasan penulis tentang bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-undang Perpajakan serta akuntansi Pajak Penghasilan pada PT. QUART TRUST PEKANBARU
- c. Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dapat menerapkan perhitungan dan penerapan akuntansi pajak dalam prakteknya

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. QUART TRUST PEKANBARU yang berlokasi di Jalan T.Bey Perum Bumi Sejahtera Blok B II / 2 RT.02 RW.012 Simpang Tiga – Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru – 28284 Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Desember 2012 sampai dengan selesai.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk jadi atau sudah ada seperti : Neraca, Laporan Laba Rugi, Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP) pada tahun 2011, Surat Keterangan Terdaftar dari perusahaan dan Struktur Organisasi yang juga diperoleh dari Direktur Utama Perusahaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lain, dilakukan dengan cara wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan Direktur Utama Perusahaan untuk mendapatkan data cara perhitungan Pajak Penghasilan.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami mengenai susunan skripsi ini, penulis membaginya dengan uraian pokok dari masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang berisikan atau menguraikan secara singkat mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan penelitian.

BAB III : Bab ini akan menguraikan tentang hal-hal yang terkait dengan objek penelitian yaitu PT. Quart Trust Pekanbaru. Disini akan dibahas mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi serta bidang kegiatan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh).

BAB IV : Pada bab ini merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan mengenai PT. Quart

Trustsehubungan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan serta penerapannya pada perusahaan tersebut, biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan, kewajiban pajak, dan akuntansi pajak.

BAB V : Berisi kesimpulan penulis terhadap masalah-masalah yang ada dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan

Dunia usaha tidak akan pernah lepas dari dua hal, yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi berkaitan dengan prosedur pencatatan semua transaksi yang terjadi dalam satu siklus operasi untuk menentukan posisi keuangan pada suatu titik waktu dan laba/rugi dari operasi yang telah dilaksanakan. Selanjutnya masalah pajak, ini berkaitan erat dengan hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan.

Transaksi-transaksi perpajakan yang dimulai dari menghitung hingga menyetorkan pajak terutang ke kas Negara pun, harus dicatat dengan baik. Prosedur pencatatan transaksi perpajakan dilakukan berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 46 tentang akuntansi pajak penghasilan.

B. Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak tersebut kemudian dikoreksinya, dan berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak dapat diartikan sebagai :

“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian Pajak Prof.Dr.P J.A. Adriani mengemukakan sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari Pengertian Pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi
3. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan)
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

Perusahaan pada umumnya membuat laporan keuangan komersial setiap tahun. Laporan keuangan tersebut akan diadakan koreksi-koreksi sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan kemudian dihitung besarnya pajak terutang pada akhir tahun.

2. Pajak Penghasilan

Soebakir, dkk (2009:41) mengemukakan definisi pajak penghasilan sebagai :

“Suatu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subyek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam

bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.

Ketentuan material mengenai Pajak Penghasilan (PPh) sebagian besar dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Sedangkan ketentuan formal mengenai Pajak Penghasilan dimuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagai yang telah beberapa kali diubah yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan definisi Pajak Penghasilan.

Pengertian Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

C. Subjek Pajak Penghasilan

Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap. Penggolongan subjek pajak menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;

3. Badan

Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; dan

4. Bentuk usaha tetap (BUT)

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan

- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

1. Subjek Pajak terdiri dari

- 1) Subjek Pajak Dalam Negeri
- 2) Subjek Pajak Luar Negeri.

- 1) Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
- c. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b) Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD

- c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- e) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak Luar Negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

2. Tidak termasuk Subjek Pajak

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan warga Negara Indonesia; dan
 - b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 - c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b. Tidak menjalankan usaha; atau
 - c. Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia; dan
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

D. Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

1. Objek Pajak yang dikenakan PPh final Atas penghasilan berupa:
 - a. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
 - b. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
 - c. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta
 - d. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Tidak Termasuk Objek Pajak
 - a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
 - b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - c. Warisan;
 - d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 - e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
- k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;

3. Adapun jenis-jenis penghasilan sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Pajak

Penghasilan antara lain :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension atau imbalan dalam bentuk lainnya dalam Undang-undang.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta (capital gain)
- e. Penerimaan kembali pajak yang semula telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalty
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

- n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerja bebas
- o. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. (Azhari S, 2006 : 44-45)

4. Penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan

Adapun jenis-jenis penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti : gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaries, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya.
- d. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas, seperti :
 - a) Keuntungan karena pembebasan hutang
 - b) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - c) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - d) Hadiah undian. (Azhari S, 2006 : 44)

5. Adapun yang tidak termasuk sebagai penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 yang tidak termasuk sebagai penghasilan adalah :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang terbentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
- Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dari penyertaan modal dari badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
 - h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana yang dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan
 - i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi
 - j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh dari perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha
 - k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat pasangan badan usaha tersebut adalah :

1. Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
2. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (Undang-undang Pajak Penghasilan, 2008 : 7-8).

E. Tarif Pajak

Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tarif Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subyek Pajak. Penghasilan ada yang merupakan objek pajak dan ada yang bukan objek pajak. Apabila penghasilan diterima atau diperoleh Subyek Pajak, maka Subyek Pajak tersebut akan mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh). Pertanyaan selanjutnya adalah berapa PPh terutang atas dan bagaimana cara penghitungan PPh atas penghasilan tersebut.

Menurut Prof Gunadi (2009), penghitungan PPh terutang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- 1) Unitary taxation, yaitu semua jenis penghasilan dijumlahkan menjadi satu dan dikenakan dengan tarif umum (biasanya bersifat progresif) dan tidak bersifat final.

- 2) *Schedular taxation*, yaitu mengenakan pajak atas jenis penghasilan tertentu dengan mengalikan tarif tersendiri (*tariff tunggal*) dan bersifat final.

Penghitungan Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) pada awalnya (berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983) menganut *unitary taxation*, dimana seluruh penghasilan dijumlahkan menjadi satu dan dikenakan dengan tarif umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Akan tetapi dalam perkembangannya, sejak dilakukannya amandemen terhadap UU PPh dan diberlakukannya PPh Final atas jenis penghasilan tertentu dan wajib pajak tertentu, maka UU PPh Indonesia telah bergeser dari *unitary taxation* murni menjadi campuran (terdapat pengenaan pajak tersendiri /*schedular taxation* atas jenis penghasilan tertentu atau wajib pajak tertentu).

Pertimbangan diberlakukannya *schedular taxation* ini adalah untuk kesederhanaan, kemudahan administrasi dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Dengan sistim ini, Wajib Pajak yang menerima penghasilan tertentu wajib membayar pajak berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan bruto yang diterima dan bersifat final. Sistim ini dianggap kurang memberi keadilan karena wajib pajak wajib membayar pajak tanpa melihat apakah Wajib Pajak untung atau rugi.

F. Wajib Pajak Badan

1. Pengertian Badan dan Wajib Pajak Badan

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

2. Pajak Penghasilan Badan

Pada pasal 1 UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu :

- a. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- b. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun

3. Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan

Berikut kewajiban dari Wajib Pajak Badan :

1. Kewajiban mendaftarkan diri

Dalam hal ini mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU PPN 1984, maka wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Untuk wajib pajak badan atau pengusaha kecil yaitu selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maka tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi, apabila peredaran brutonya lebih dari 600 juta maka wajib mengukuhkan diri menjadi PKP.

Pada pasal 2 ayat (4) UU KUP, “Dirjen Pajak menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

2. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan.

Sebagaimana terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU KUP, yaitu WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

4. Pembukuan

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mendapatkan data & informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang PPN, yang dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen) dan yang dikenakan PPnBM, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan penghitungan rugi/laba pada saat tahun pajak berakhir.

Ketentuan mengenai Pembukuan. Pembukuan tersebut harus diselenggarakan dengan:

- a. Memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya,

- b. Harus diselenggarakan di Indonesia, dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menkeu,
- c. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas,
- d. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak.

Prinsip Taat Asas :

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Misalnya dalam penerapan : Stelsel pengakuan penghasilan; Tahun buku; Metode penilaian persediaan; Metode penyusutan dan amortisasi.

5. Kewajiban Melakukan Pemotongan dan Pemungutan

Diantaranya yaitu :

1. Kewajiban pajak sendiri (seperti PPh Pasal 25/29);
2. Kewajiban memotong atau memungut (pot/put) pajak atas penghasilan orang lain (misalnya: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final); dan
3. Kewajiban memungut PPN dan atau PPn BM (jika ada) yang khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak Badan secara umum bisa diuraikan sebagai berikut:

a. PPh Pasal 21/Pasal 26

Yaitu PPh yang wajib dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh orang pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU PPh.

Wajib Pajak Badan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut maupun penghasilan orang pribadi lainnya, seperti tenaga ahli, yang dibayar atau terutang oleh perusahaan. Dalam hal terdapat pembayaran penghasilan, yang termasuk objek PPh Pasal 21, kepada orang pribadi yang berstatus WP luar negeri, PPh yang dipotong mengacu pada ketentuan Pasal 26 UU PPh atau berdasarkan tax treaty.

Kewajiban PPh Pasal 21/Pasal 26 yang harus dilaksanakan, meliputi:

a) SPT Masa PPh Pasal 21/26 pada setiap Masa Pajak

Merupakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung dan disetor oleh Wajib Pajak Badan, yang terutang pada setiap masa pajak. PPh Pasal 26 yang terutang atas pembayaran kepada orang pribadi yang berstatus Wajib Pajak Luar Negeri juga wajib dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21. Pada dasarnya, PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT Masa merupakan angsuran atau pajak dibayar di muka untuk PPh Pasal 21 yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

b) SPT Masa PPh Pasal 21 pada Akhir Tahun Pajak

Merupakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung dan dilunasi pada suatu tahun pajak, termasuk PPh Pasal 26 yang terutang atas penghasilan orang pribadi berstatus WP luar negeri. SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Akhir Tahun Pajak sebenarnya merupakan penghitungan ulang atas PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember. Bisa jadi, pada SPT Masa PPh Pasal 21 pada akhir tahun nantinya timbul kurang bayar, atau lebih bayar, atau mungkin juga nihil (PPh Pasal 21 yang sudah disetor sama dengan PPh Pasal 21 yang terutang).

b. PPh Pasal 23

Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, royalty, bunga, hadiah dan penghargaan selain yang telah dikenakan PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa sehubungan dengan jasa-jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain, yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 23 UU PPh.

c. PPh Pasal 26

Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen; bunga; royalty; sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan

penghargaan; serta pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang diterima/diperoleh WP luar negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 26 UU PPh.

Penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 26 sebaiknya tetap dilakukan secara tersendiri, meskipun untuk pelaporannya digabungkan dengan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, tergantung pada jenis objek pajaknya serta penerima penghasilannya;

- 1) Jika objek pajaknya cenderung sama dengan PPh Pasal 21 dan penerima penghasilannya adalah orang pribadi berstatus WP luar negeri, maka pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26;
- 2) Jika penerima penghasilannya berbentuk badan dan berstatus WP luar negeri, pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.

d. PPh Final

Yaitu PPh yang dipotong atas jenis penghasilan tertentu atau jenis usaha tertentu yang diatur secara khusus (special treatment) melalui peraturan pemerintah. Misalnya, PPh Final atas persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi, seandainya Wajib Pajak Badan menyewa gedung dari pihak lain untuk dipergunakan sebagai kantor, maka Wajib Pajak Badan wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Final yang terutang atas sewa kantor tersebut.

e. PPh Pasal 25

Yaitu pembayaran angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan. Besarnya PPh Pasal 25 yang wajib disetor setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU PPh beserta ketentuan pelaksanaannya.

f. PPh Pasal 29

Yaitu kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada akhir tahun pajak, dengan memperhitungkan kredit pajak berupa angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor setiap bulan dan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain

g. PPN

Yaitu pemungutan pajak atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam Daerah Pabean, yang meliputi suatu masa pajak. Dalam hal BKP tergolong barang mewah, terdapat Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) yang juga terutang sesuai ketentuan UU yang berlaku.

4. Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
5. Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak
6. Kewajiban membuat faktur pajak
7. Kewajiban melunasi bea materai
8. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

6. Hak Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan

Adapun hak dari wajib pajak dalam perpajakan, yaitu :

- a. Hak untuk mendapat pembinaan dan pengarahan dari fiskus
- b. Hak untuk membetulkan, memperpanjang waktu penyampaian SPT
- c. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan gugatan serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
- d. Hak untuk memperoleh kelebihan pembayaran pajak
- e. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan
- f. Hak untuk mendapat fasilitas perpajakan
- g. Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak, menunda penagihan pajak, dan memperoleh imbalan bunga dari keterlambatan pembayaran kelebihan pajak oleh DJP
- h. Hak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
- i. Hak mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang dikeluarkan sesuai biaya fiskal.

7. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan

Saat terutang dari pajak penghasilan badan adalah pada saat badan atau perusahaan tersebut sudah mendapat penghasilan atau laba. Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, pph badan harus dibayar paling

lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (angsuran pajak).

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembayaran pajak dilakukan melalui Bank Persepsi atau bank Devisi Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara online. Pembayaran pajak harus digunakan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. SSP atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Apabila pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak maka penyeteran kekurangan pajak yang terutang (pph pasal 29) harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT Tahunan disampaikan. Sedangkan, untuk pelaporan SPT, maksimal disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.

G. Perhitungan Laba Menurut Undang-undang Perpajakan

Sebagaimana telah diketahui bahwa ada wajib pajak yang diharuskan membuat pembukuan. Perhitungan PPh tahunan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan ini dimulai dengan menghitung penghasilan neto untuk mendapatkan dasar pengenaan pajaknya., biasanya disebut penghasilan kena pajak.

a. Biaya

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dua golongan yaitu :

1. Beban atau biaya yang mempunyai manfaat tidak lebih dari satu tahun, misalnya : biaya gaji, biaya administrasi dan biaya bunga.
2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, misalnya : pembebanan dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi :

- a. Biaya yang boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan bruto (*deductible expenses*).
- b. Biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan bruto (*non deductible expenses*).

Untuk kepentingan penghitungan pajak, biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Pasal 6 UU PPh diatur

mengenai biaya yang berkenaan sebagai pengurangan penghasilan bruto atau biaya fiskal diatur dalam Pasal 9 UU PPh.

1) Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto

Untuk kepentingan perhitungan pajak, biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Pasal 6 UU PPh diatur mengenai biaya yang berkenaan sebagai pengurangan penghasilan bruto atau biaya fiskal diatur dalam Pasal 9 UU PPh.

Adapun biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UU PPh tersebut antara lain :

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;

7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi

pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

2) Pengeluaran-pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan Sebagai Biaya

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menetapkan biaya atau pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha operasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan

syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

h. Pajak Penghasilan;

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undang di bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak boleh untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

H. Teori Nominatif

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai biaya "entertainment", representasi, jamuan tamu dan sejenisnya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Biaya "entertainment", representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan

2. Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materil).

3. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangi biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif

I. Pajak Dalam Islam

Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Dalam islam juga dikenal dengan istilah zakat. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.

Perpajakan yang ditetapkan pemerintah melalui Undang-undangnya wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.

Alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan Negara, disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas

sosial dan tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruguthni dari Fatimah binti Qayis, Rasulullah SAW Bersabda :

“Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain di luar zakat”

Allah berfirman dalam surat AL-BAQARAH (2) Ayat 177:

“Dan yang utama adalah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta

177. bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta

yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin, yaitu kewajiban membayar pajak sekaligus menunaikan zakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Quart Trust adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang konsultan konstruksi dan non-konstruksi. PT. Quart Trust didirikan tahun 2006.

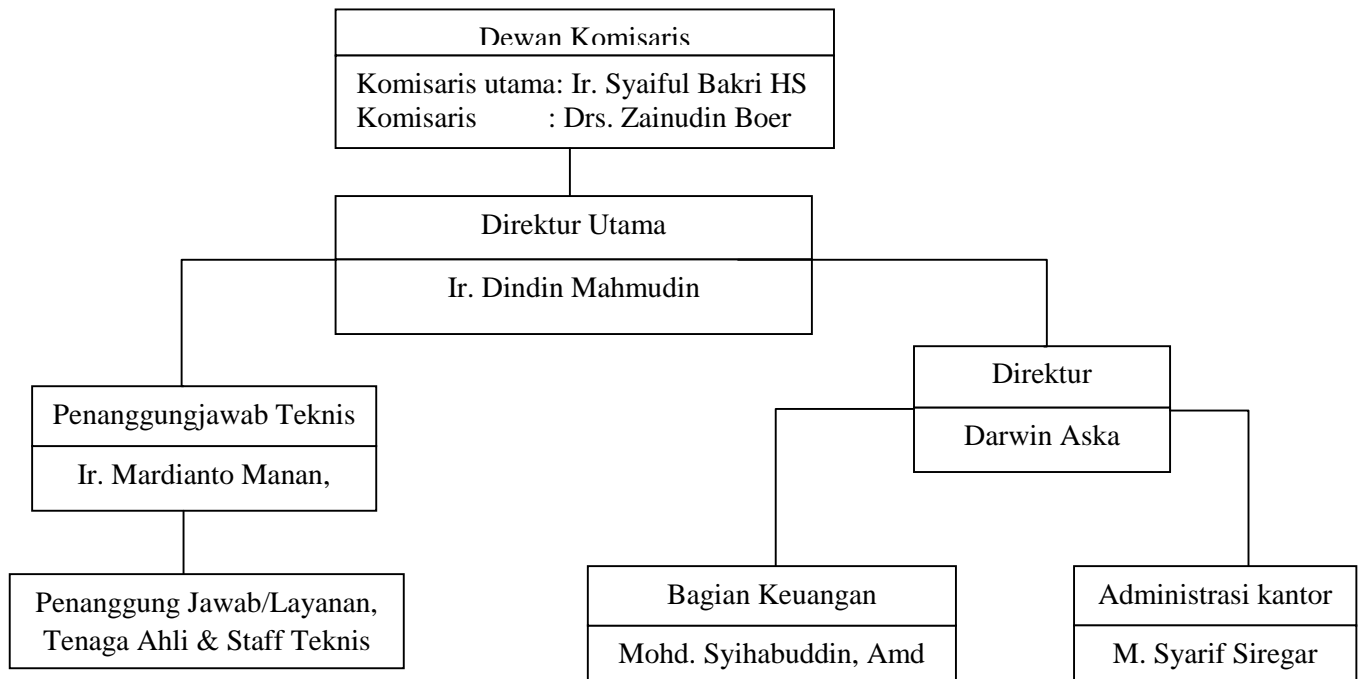
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001, dengan ini diterangkan bahwa PT. Quart Trust dengan nomor wajib pajak (NPWP) 02.615.665.3-216.000 yang beralamat di Jl.T Bey Blok B-2 No.2 Simpang Tiga telah terdaftar sejak tanggal 13 Oktober 2008

B. Struktur Organisasi

Dalam suatu perusahaan yang sedang berkembang dimana kegiatan usaha yang harus dilakukan semakin kompleks. Maka untuk mendukung kelancaran dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditentukan maka diperlukan adanya kordinasi, kesatuan dalam bertindak dan berbuat serta pengendalian yang telah terjamin, sesuai struktur organisasi. Berikut in akan dijelaskan bagian-bagian struktur organisasi dalam PT. Quart Trust

Table III.I

STRUKTUR ORGANISASI PT.QUART TRUST



Sumber: PT. QUART TRUST

1. Dewan Komisaris

Sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan terbatas (PT). Di Indonesia Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris.

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan nasihat kepada direktur

- b. Dalam melakukan tugas, dewan direksi berdasarkan kepada kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT.
- c. Kewenangan khusus dewan komisaris, bahwa dewan komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu

2. Direktur Utama

Merupakan puncak pimpinan yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan aktifitas perusahaan

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi perusahaan
- b. Menentukan kebijakan-kebijakan secara umum yang menyangkut tentang pengambilan keputusan mengenai kebijakan-kebijakan perusahaan
- c. Mengkoordinir semua kegiatan yang ada dalam perusahaan
- d. Membuat rencana-rencana perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang
- e. Memberikan persetujuan kepada manajer dalam hal memberi, menjual dan memindahkan hak milik atas harta kepada pihak lain

3. Wakil Direktur

Merupakan bawahan Direktur Utama yang memiliki tugas dan tanggung jawab menggantikan tugas-tugas Direktur Utama apabila direktur utama tidak sedang

di tempat atau sedang berhalangan atau dengan kata lain mewakili Direktur Utama apabila tidak berada ditempat

4. Bagian keuangan

Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

- a. Mencatat semua transaksi-transaksi keuangan dalam buku jurnal, buku besar dan buu tambahan.
- b. Menata, menyimpan dan memelihara sema dokumen yang berhubungan dengan akuntansi.
- c. Membuat laporan keuangan secara periodic yang meliputi:
 1. Neraca
 2. Laporan laba rugi
 3. Laporan perubahan posisi keuangan
 4. Laporan-laporan lain yang dianggap perlu
- d. Pelaksanaan pembayaran setiap pengeluaran dan kewajiban membayar kepentingan-kepentingan usaha yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan.
- e. Mengatur semua pemasukan uang dan pengeluaran biaya-biaya operasional perusahaan
- f. Melakukan tugas-tugas khusus lainnya dibidang keuangan.
- g. Melakukan perhitungan besarnya pajak berdasarkan laporan keuangan.
- h. Mlaksanakan kewajiban perpajakan (menghitung, menyetor dan melporkan)

5. Administrasi kantor

Merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasi (mengatur dan menyusun), mengarahkan (membeikan arah dan petunjuk), mengawasi dan mengendalikan (melakukan control) sampai menyelenggarakan secara tertb suatu hal.

C. Aktivitas Perusahaan

Aktivitas perusahaan merupakan kegiatan yang terjadi didalam dan diluar perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kelancaran jalannya perusahaan. Dengan aktivitas perusahaan yang lancer diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien dalam usaha meningkatkan hasil yang optimal. Disamping mendukung misi pemerintah, PT QUART TRUST PEKANBARU sebagai salah satu perusahaan yang diserahkan untuk ketentuan laba

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Laporan perhitungan laba rugi mengihsarkan pendapatan yang diperoleh dan beban yang diperhitungkan selama jangka waktu tertentu. Perusahaan membuat laporan perhitungan laba rugi pada setiap akhir periode akuntansi beserta item-item laporan keuangan lainnya yang berakhir pada 31 Desember.

Dari laporan perhitungan laba rugi dapat dilihat jumlah laba yang diperoleh perusahaan belum diadakan koreksi fiskal. Karena laba yang disajikan tersebut adalah laba komersil yang tentunya memiliki perbedaan dengan laba fiskal.

A. Perhitungan Laba Menurut Undang-undang Perpajakan

1. Biaya Entertainment

Dalam laporan Laba Rugi adanya Biaya Entertainment sebesar Rp. 10.000.000,- sedangkan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan bahwa Biaya Entertainment dapat dimasukkan sebagai pengurang biaya, akan tetapi wajib pajak harus membuat daftar nominatif dalam SPT tahunan. Dalam biaya entertainment komponen-komponen yang dimasukan yaitu: representasi, jamuan dan sejenisnya yang dapat dikurangkan dari penghasilan

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai biaya "entertainment", representasi, jamuan tamu dan sejenisnya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Biaya "entertainment", representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan
2. Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materil).
3. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangi biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif

2. Biaya Sumbangan

Dalam Laporan Laba/Rugi juga terdapat Biaya Sumbangan sebesar Rp. 5.000.000,- yang seharusnya tidak boleh dibebankan sebagai pengurangan biaya, hal ini dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf g bahwa biaya sumbangan selain dari biaya memperoleh, menagih, dan memelihara Pajak Penghasilan.

Biaya sumbangan seharusnya dalam laporan Laba/Rugi dimasukkan kedalam biaya lain-lain dikarenakan sumbangan merupakan bukan biaya pengurang bruto kecuali sumbangan yang sudah ditetapkan perusahaan (donator tetap) dan pada SPT tahunan PPh WP badan biaya sumbangan dimasukkan dalam biaya lainnya

Cara pelaporannya dimasukkan dalam laporan Laba/Rugi dibiaya lainnya, kalau sumbangan diluar sebagai donator tidak dipotong persen pengeluaran sumbangan jika pihak perusahaan ada sebagai donator maka pengeluaran atau persen sumbangan tergantung kebijakan perusahaan

3. Biaya Telepon seluler

Dari hasil wawancara penulis menemukan adanya kesalahan pencatatan dalam Laporan Laba/Rugi dimana dengan Biaya Telepon terdapat Biaya Telepon Seluler Direktur sebesar Rp.5.000.000,- yang seharusnya tidak boleh dibebankan sebagai pengurangan biaya, hal ini dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf I yaitu untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Table IV.I
Laporan Koreksi Fiskal

	Laporan Komersil	Koreksi Fiskal	Laporan Fiskal
Peredaran Usaha	1,420,068,835		1,420,068,835
Gaji	550,285,495		550,285,495
Bahan-Bahan & Peralatan	53,159,500		53,159,500
Biaya Transportasi dan Akomodasi	406,480,000		406,480,000
Biaya telepon	15,135,000	(5,000,000)	10,135,000
Pelaporan	44,805,000		44,805,000
Entertainment	10,000,000	(10,000,000)	-
Biaya seminar	31,000,000		31,000,000
Penyusutan	15,936,464		15,936,464
Biaya sewa kantor	8,000,000		8,000,000
sumbangan	5,000,000	(5,000,000)	-
Biaya perawatan kantor	11,000,000		11,000,000
Biaya listrik	2,400,000		2,400,000
Jumlah Biaya	1,153,201,459		1,133,201,459
Laba sebelum pajak	266,867,376		286,867,376
Pajak PPh	33,558,422		71,716,844
Laba setelah pajak	233,508,954	18,358,422	215,150,532

Sumber: data olahan

Dari laporan koreksi fiskal sebagaimana dilihat kenaikan laba sebelum pajak sebesar Rp. 18,358,422 dari Rp. 266,867,376 menjadi Rp. 286,867,367 dengan adanya kenaikan laba sebelum pajak akan mempengaruhi jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun dengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak terutang sebelum koreksi fiskal

Penghasilan kena pajak Rp. 266,867,376

Pajak yang terutang

$$25\% \times 266,867,376 = \text{Rp. } 66,716,844$$

Pajak terutang setelah koreksi fiskal

Penghasilan kena pajak Rp. 286,867,367

Pajak yang terutang

$$25\% \times 286,867,367 = \text{Rp. } 71,716,841$$

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini penulis mencoba menarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian, mengemukakan saran-saran sebagai masukan pada PT. Quart Trust Pekanbaru

A. Kesimpulan

Dalam perhitungan laba rugi perusahaan memasukan perusahaan memasukan beberapa komponen biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan yaitu diantaranya:

1. Biaya entertainment

Biaya Entertainment dapat dimasukkan sebagai pengurang penghasilan, akan tetapi wajib pajak harus membuat daftar nominatif dalam SPT tahunan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan

Biaya entertainment atau jamuan dan sejenisnya dapat dikurangkan sebagai biaya dengan syarat:

- a. Benar-benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak

- b. Dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh, yang memuat nomor urut, tanggal dan jenis entertainment, nama tempat, alamat, jumlah, nama relasi, posisi, nama perusahaan, jenis usaha.

2. Biaya sumbangan

Biaya sumbangan seharusnya dalam laporan Laba/Rugi dimasukan kedalam biaya lain-lain. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf g bahwa biaya sumbangan selain dari biaya memperoleh, menagih, dan memelihara Pajak Penghasilan tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan

3. Biaya telepon seluler

Biaya telepon seluler untuk kepentingan pribadi tidak boleh dibebankan sebagai pengurangan biaya, hal ini dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf I

B. Saran

1. Laporan keuangan perusahaan yang disusun oleh perusahaan tidak dapat menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan karena adanya perbedaan-perbedaan dalam perhitungan yang menyebabkan terjadinya ketidakcocokan antara laporan keuangan perusahaan yang dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan laporan keuangan yang disesuaikan dengan Undang-undang

Perpajakan. Oleh karena itu perlu adanya rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan.

2. Dengan menyadari pentingnya informasi perpajakan bagi perusahaan dalam melaksanakan peraturan-peraturan perpajakan yang ada, maka perusahaan dituntut untuk mempelajarinya, karena dengan adanya kesalahan perusahaan dalam menentukan biaya deductible dan non deductible menyebabkan kemungkinan adanya denda atau sanksi atas kesalahan tersebut apabila dilakukan pemeriksaan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan merekrut tenaga ahli perpajakan atau memberikan pelatihan perpajakan
3. Perusahaan harus meningkatkan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan, sehingga dapat lebih memahami biaya-biaya yang dapat maupun tidak dapat dijadikan penghasilan bruto agar tidak merugikan perusahaan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Surat AL-BAQARAH (2) Ayat 177
- Dirjen Pajak, 2006, *Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan 26*, CV. Tamita Utama, Yogyakarta
- Harnanto, 2003. *Akuntansi Perpajakan*. BPFE. Yogyakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002*
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi, ANDI. Yogyakarta
- Marisi, P. Purba dan Andreas. 2004. *Isu-isu Kontemporer Akuntansi Keuangan*. Universitas Riau, Pekanbaru
- Muljono, Djoko, 2009, *Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko & Baruni Wicaksono, 2009, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- Muljono, Djoko, 2010, *Hukum Pajak*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- Pawoko, Sigit Ilmu, 2008, *Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2007*, Salemba Empat, Jakarta
- S, Azhari, 2006. *Pengantar Hukum Pajak dan Perpajakan*. UNRI PRES.
- S, Azhari, 2007. *Hukum Pajak dan Pengantar Perpajakan*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru
- Setiawan, Agus, 2008, *Cara Mudah Menghitung Pajak Penghasilan Badan Dengan Undang-undang Pajak*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sihaloko, Cyrus, 2003, *Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suprianto, Edi, 2011, *Akuntansi Perpajakan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 09/PJ.42/2002*
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007*
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008*
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000*

Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Edisi ke 9, Salemba Empat, Jakarta.

Zakaria, Tata, 2005, *Perlakuan Perpajakan Terhadap Badan Usaha Tetap (BUT)*,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta